

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut UU No.23 pasal 1 ayat 6 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, secara ketentuan umumnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pelaksanaan Otonomi Daerah seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 tentang Pemerintah Daerah, Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka peran dan fungsi organisasi pemerintah desa sangatlah strategis dan keberhasilan program pemerintah tersebut dapat dilihat dari baik tidaknya akuntabilitas kinerja.

Nur Dai (2018) Tingkat keberhasilan pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja organisasinya. Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja suatu organisasi dalam mencapai tujuannya yang dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa fisik seperti sumber daya adapun non fisik seperti peraturan, informasi, dan kebijakan. Konsep kinerja organisasi juga menggambarkan bahwa setiap organisasi publik memberikan pelayanan

kepada masyarakat dan dapat dilakukan pengukuran kinerjanya dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang ada untuk melihat apakah organisasi tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan untuk mengetahui tujuannya sudah tercapai atau belum.

Perwujudan normatif pertanggungjawaban sebuah instansi pemerintah, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan informasi kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya ([www.bandung.go.id/lkp.kecamatan.cimencyan](http://www.bandung.go.id/lkp.kecamatan.cimencyan)). Sejalan dengan itu, menurut Indrayani (2017) Akuntabilitas kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan dalam sektor publik penganggaran merupakan suatu proses politik. Penganggaran sektor publik terkait dengan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.

Fenomena yang terjadi di banyak desa di Ponorogo yaitu masih banyak desa yang belum memiliki website atau media, pemasangan baliho yang mendukung adanya publikasi tentang pertanggungjawaban kegiatan desa, website atau media, dan baliho juga merupakan tolak ukur pelaksanaan pemerintahan yang transparan. Salah satu diantaranya adalah desa-desa dikecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, tidak adanya update berkala terkait dengan laporan kegiatan yang dilaksanakan baik website desa maupun kecamatan. Laporan kegiatan tersebut dapat menjadi tolak ukur tentang

kejelasan anggaran serta realisasi dari perencanaan anggaran yang dibuat  
(Sumber: [www.mlarak.ponorogokab.go.id](http://www.mlarak.ponorogokab.go.id)).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap Instansi untuk melakukan akuntabilitas masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian organisasi sesuai tujuan pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan kinerja. Sejalan dengan peraturan tersebut, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa sangat berguna untuk menilai seberapa jauh tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur perangkat desa, sedangkan secara internal akuntabilitas kinerja dalam struktural desa dijadikan sebagai sarana evaluasi, serta tolak ukur keberhasilan kinerja aparatur perangkat desa. Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat dari kejelasan sasaran anggaran serta sistem pelaporannya.

Hanafi E (2019) Kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran yang dibuat secara jelas dan spesifik juga sebagai langkah preventif pemerintah desa untuk mencegah adanya tindakan kecurangan. Implementasi dari sistem kejelasan anggaran juga diharapkan dapat meningkat tingkat kepercayaan masyarakat apabila sasaran anggaran tersebut dilaksanakan secara transparan dengan menggunakan sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabel).

Hidayatullah (2015) Sistem Pelaporan adalah Laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem Pelaporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja, yang diharapkan mampu menunjang Pengendalian Internal pada Instansi dengan menggunakan Sistem Pengendalian Intern Keuangan Desa .

Efektivitas Pengendalian Internal pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Efektivitas Sistem Pengendalian Internal sangat penting untuk menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik. Pengendalian Internal yang baik meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa serta memunculkan kepercayaan masyarakat, serta mencegah segala bentuk penyelewengan dan tindak kecurangan.

Komitmen Organisasi adalah Kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi daripada kepentingan pribadi (Soekidjan, 2013:201). Dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang mencakup kepercayaan, kemauan, kesetiaan dan keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi demi tercapainya tujuan organisasi tersebut. Secara keseluruhan komitmen organisasi memiliki peran yang sangat penting demi tercapainya tujuan organisasi, ketertarikan dengan

tujuan, nilai dan saran organisasi yang ditunjukkan dengan adanya penerimaan individu atas nilai dan tujuan organisasi serta memiliki keinginan untuk berafiliasi dengan organisasi dan kesediaan bekerja keras untuk organisasi. Hal ini dapat membuat individu betah dan tetap ingin bertahan diorganisasi demi kelangsungan organisasi tersebut.

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan Hidayatullah (2015) yang memperoleh hasil penelitian bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan Menurut Penelitian Herawaty (2010) yang hasil penelitiannya bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap AKIP dan sistem pelaporan berpengaruh. Ketidak konsistenan terkait dengan hasil penelitian Hidayatullah (2015) dan Herawaty (2010) tersebut, menjadi alasan utama peneliti ingin melakukan pengujian kembali. Perbedaan yakni dengan menambahkan Variabel Komitmen Organisasi.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, Peneliti ingin meneliti pengaruh pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, efektivitas pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja serta faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan peneliti ingin mengambil judul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem pelaporan, Efektivitas Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Kasus Desa Se-kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”**.

## 1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja?
2. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja?
3. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja?
4. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja?
5. Apakah sasaran anggaran, sistem pelaporan, efektivitas pengendalian internal, komitmen organisasi berpengaruh Akuntabilitas Kinerja?

## 1.2 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai perumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja.
2. Mengetahui pengaruh system pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja.
3. Mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja.
4. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja.
5. Mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, efektivitas pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja.